

**PENGARUH KEJELASAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP DENGAN KEPATUHAN REGULASISEBAGAI VARIABEL MODERASI**

*Yulisanti<sup>1</sup>, Astri Furqani<sup>2</sup>*

*<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja*

E-Mail : [yulisanti1204@gmail.com](mailto:yulisanti1204@gmail.com), [astri@wiraraja.ac.id](mailto:astri@wiraraja.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Salah satu tujuan dari organisasi sektor publik adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Asosiatif. Objek penelitian ini dilakukan di 24 OPD kabupaten Sumenep sebagai Populasi Sedangkan sampel sebanyak 96 dari 4 responden dari masing-masing OPD. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan anggaran dan Pengendalian akuntansi tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Sistem pelaporan berpengaruh negatif sedangkan Pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Kepatuhan regulasi tidak mampu memoderasi kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep.

**Kata kunci :** Akuntabilitas Kinerja, Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Pengawasan Fungsional

**1. INTRODUCTION**

Salah satu tujuan dari organisasi sektor publik adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Menurut Rio Pratama et al., (2020) sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan

berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut.

Dina Lathifa (2022) menyatakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan suatu organisasi. Setiap kegiatan organisasi harus

dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Adanya pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat diketahui suatu kinerja organisasi.

Untuk menghadapi pertanggungjawaban di atas, maka pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal antara lain kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Penyusunan anggaran tentunya perlu melibatkan para pihak untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran agar penyusunan anggaran dapat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut diperlukan pengendalian akuntansi terhadap semua kegiatan pemerintahan untuk menghindari terjadinya kecurangan serta mengawasi dan mengarahkan setiap kegiatan yang dilakukan penggunaan sumber dayanya lebih efektif dan efisien.

Kemudian, jika pengendalian akuntansi sudah dianggap baik, maka selanjutnya harus dilakukan sistem pelaporan yang menyediakan beberapa informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Selain sistem pelaporan, pengawasan

fungsional juga sangat penting untuk dilakukan dalam proses penganggaran. Pengawasan fungsional difungsikan sebagai proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan penggunaan dan alokasi anggaran sudah dilakukan dengan tujuan yang telah ditentukan.

Kurniawan et al., (2020) mengungkapkan bahwa dalam beberapa fenomena, negosiasi di antara para pengelola anggaran berimplikasi pada peningkatan fenomena korupsi kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa sebanyak 361 kepala daerah di Indonesia terlibat kasus tindak pidana korupsi. Korupsi anggaran ini merupakan masalah serius yang kerap terjadi di Indonesia dan sudah menjadi budaya yang dinormalisasi.

Adanya kasus-kasus tersebut membuat beberapa peneliti tergerak melakukan penelitian yang menyangkut anggaran pemerintah. Menurut Imelda (2022) yang meneliti kejelasan anggaran yang dilakukan di Kabupaten Barito Utara, menunjukkan bahwa kejelasan anggaran dan pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Barito Utara. Penelitian Afilu Hidayattullah (2022) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengujian secara

simultan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Merauke.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep? dan Bagaimana kepatuhan regulasi mampu memoderasi adanya kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep?

Manfaat dari Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi instansi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.

## **2. LITERATURE REVIEW**

### **a. Teori Agensi**

Landasan teori yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan sendiri atau Agency theory adalah teori yang melandasi pemerintah dalam menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja. Hal tersebut diperlukan karena masyarakat memiliki hak dan kewenangan untuk memperoleh informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang harus dipertanggung

jawabkan, disajikan, dilaporkan, dan diungkapkan, Anggitasari (2019).

### **b. Penelitian Terdahulu**

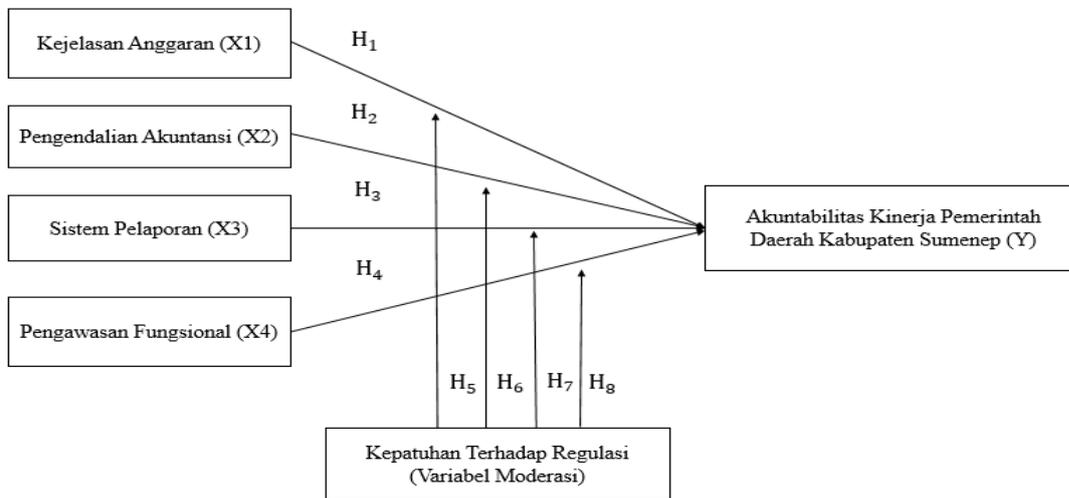
Menurut penelitian Rio Pratama<sup>1</sup> et al., (2020), hasil pengujian data, secara parsial menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kota Padang Pariaman. Sedangkan untuk kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya penelitian Afilu Hidayattullah (2022) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengujian secara simultan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Merauke.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Anisa & Haryanto(2022) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan untuk kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh. Selanjutnya penelitian Lahur et al., (2022) menunjukkan bahwa kejelasan anggaran dan pengawasan fungsional memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sedangkan berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa variabel kejelasan anggaran, implementasi SAP dan

pengawasan fungsional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

kinerja pemerintah pada SKPD di Kabupaten Barito Utara.

**c. Kerangka Pikir Penelitian**



Sumber : diolah oleh peneliti

**d. Perumusan Hipotesis**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afilu Hidayatullah (2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H<sub>1</sub> = Kejelasan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah

Penelitian yang dilakukan Anjarwati (2022) yang mengemukakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H<sub>2</sub> = Penerapan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anastasha Natalia Arlinda (2017) bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana semakin baik diterapkannya Sistem Pelaporan, maka tentu akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan dari teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana jika semakin baik Sistem Pelaporan Keuangan, maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan begitu pun jika sebaliknya. Maka peneliti dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> = Sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Imelda (2022) bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Barito Utara. Sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintahnya tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Barito Utara.

$H_4$  = Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulya (2022) yang menganalisis tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah menggunakan kepatuhan terhadap regulasi sebagai variabel moderasi, menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sehingga dengan adanya penelitian tersebut, peneliti dapat menarik hipotesis yaitu:

$H_5$  = Kepatuhan terhadap regulasi memperkuat pengaruh positif kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzihardani (2022) yang menyatakan bahwa adanya kepatuhan terhadap regulasi memperkuat pengaruh positif signifikan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sehingga dengan adanya penelitian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

$H_6$  = Kepatuhan terhadap regulasi memperkuat pengaruh positif pengendalian

akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Helin (2022) menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi memoderasi pengaruh positif sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

$H_7$  = Kepatuhan terhadap regulasi memperkuat pengaruh positif sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penelitian Lahur et al., (2022) menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Di mana dengan adanya kepatuhan terhadap regulasi dapat berperan sebagai variabel moderasi antara pengawasan fungsional dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

$H_8$  = Kepatuhan terhadap regulasi memperkuat pengaruh positif pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

### **3. METHODS**

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif berupa pendekatan Asosiatif. Objek penelitian ini dilakukan di 24 (dua puluh empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Sumenep. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari 24 unit OPD kabupaten Sumenep. Sehingga yang akan digunakan sebagai populasi sebanyak 96 unit populasi

yang masing-masing terdiri dari 4 responden yakni: staf bagian perencanaan anggaran, staf bagian pengelola anggaran, staf bendahara, serta sekretaris dari masing-masing instansi yang tergabung dalam lingkungan OPD Kabupaten Sumenep. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling.

Jenis data yang digunakan oleh peneliti merupakan Data Subjek (self-report-data). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi dan penyebaran kuisioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program komputer SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Variabel dalam penelitian yaitu variabel terikat dan variabel bebas.

- a. Variabel terikat dalam penelitian ini: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)
- b. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari:
  - 1) Kejelasan Anggaran (X1)
  - 2) Pengendalian Akuntansi (X2)
  - 3) Sistem Pelaporan (X3)
  - 4) Pengawasan Fungsional (X4)
- c. Variabel tambahan: Kepatuhan terhadap regulasi (Z)

#### **4. RESULTS AND DISCUSSIONS**

- a. **Pengaruh Kejelasan anggaran (X1) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Y)**

Hasil pertama (H1) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien Beta pada kolom Standardized Coefficients variabel kejelasan anggaran (X1) sebesar 0,079 dengan (sig.) t sebesar 0,427. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara hubungan kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siska Septiani (2022) yang menyatakan bahwa kejelasan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Solok. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Solichin (2016) yang mengungkapkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogi Isnanto et.al., (2019) yang menyatakan bahwa kejelasan anggaran justru berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

- b. **Pengaruh pengendalian Akuntansi (X2) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Y)**

Hasil kedua (H2) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja

pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien *Beta* pada kolom *Standardized Coefficients* variabel pengendalian akuntansi (*X2*) sebesar -0,040 dengan (sig.) *t* sebesar 0,685. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah secara statistik tidak terdapat pengaruh.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah tidak bergantung pada pengendalian akuntansi instansi tersebut, hal ini dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam pengendalian internal terutama dalam menjaga sumber daya yang menjamin keakuratan dan keandalan dokumen keuangannya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pancawardani (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Helin Gustri Mulya *et.,al*(2022) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

**c. Pengaruh sistem pelaporan (X3) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Y)**

Pada hasil analisis statistik diketahui nilai *X3* pada koefisien *Beta* di kolom

*Standardized Coefficients* adalah -0,226 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,046. Nilai koefisien regresi bertanda negatif yang berarti bahwa pengaruh sistem pelaporan mengalami penurunan secara signifikan.

Menurut analisis teori agensi, sistem pelaporan ini didasarkan pada proses penumpukan, pengolahan, dan penyampaian informasi kinerja kepada prinsipal (pemerintah) oleh agen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran. Menurut Muhammad Hasanuddin (2018) menyatakan bahwa semakin baik sistem pelaporan suatu entitas, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan begitupun sebaliknya, semakin lemah sistem pelaporan suatu entitas, maka akuntabilitas kinerja pemerintah pun juga akan menurun. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak faktor namun salah satunya yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi publik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairunsyah dan Efni (2018) namun bertolak belakang dengan penelitian Afilu Hidayatullah (2019) yang mengungkapkan bahwa adanya sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

**d. Pengaruh pengawasan fungsional (X3) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Y)**

Pengawasan fungsional melibatkan pemantauan dan evaluasi atas kinerja agen pemerintah untuk memastikan bahwa mereka

mematuhi tujuan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Adanya pengawasan fungsional dapat mengurangi kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lahuret, *al*(2022) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Akan tetapi justru bertolak belakang dengan Diatmika (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

**e. Pengaruh kejelasan Anggaran (X1) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Y) dengan kepatuhan regulasi sebagai variabel moderasi (Z)**

Hasil uji statistik pada riset ini tidak mendukung adanya H5 yang diajukan, atau tidak tersedia bukti yang cukup untuk mendukung H5 pada penelitian ini. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kepatuhan regulasi tidak mampu memoderasi pengaruh kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kharismawati (2018) yang mengemukakan bahwa adanya kepatuhan regulasi tidak dapat memoderasi pengaruh kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

**f. Pengaruh Pengendalian Akuntansi (X2) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Y) dengan kepatuhan regulasi sebagai variabel moderasi (Z)**

Hasil uji statistik pada riset ini tidak mendukung H6 yang diajukan, atau tidak tersedia bukti yang cukup untuk mendukung H6 pada penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan kepatuhan terhadap regulasi tidak mampu memoderasi pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini karena pengendalian akuntansi tidak dapat menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dalam pengendalian internal yang kurang menjamin keakuratan catatan keuangan pada masing-masing OPD yang bersangkutan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Hasan (2018) yang mengungkapkan bahwa adanya kepatuhan regulasi tidak mampu meningkatkan pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

**g. Pengaruh sistem pelaporan (X3) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Y) dengan kepatuhan regulasi sebagai variabel moderasi (Z)**

Hasil uji statistik pada penelitian ini tidak mendukung H7 yang diajukan, atau tidak tersedia bukti yang cukup untuk mendukung H7 pada penelitian ini. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan regulasi tidak mampu memoderasi pengaruh positif sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

**h. Pengaruh pengawasan fungsional (X4) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Y) dengan kepatuhan regulasi sebagai variabel moderasi (Z)**

Hasil uji statistik pada penelitian ini tidak mendukung H8 yang diajukan, atau tidak tersedia bukti yang cukup untuk mendukung H8 pada penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan regulasi tidak mampu memoderasi pengaruh positif pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

**5. CONCLUSIONS**

- a. Kejelasan anggaran secara parsial tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep.
- b. Pengendalian akuntansi secara parsial tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep.
- c. Sistem pelaporan secara parsial berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep.

- d. Pengawasan fungsional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep.
- e. Kepatuhan regulasi tidak mampu memoderasi kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep.
- f. Kepatuhan regulasi tidak mampu memoderasi pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep.
- g. Kepatuhan regulasi tidak mampu memoderasi sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep.
- h. Kepatuhan regulasi tidak dapat memoderasi pengaruh sistem pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep.

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan observasi tidak dapat berjalan maksimal karena adanya kesibukan dari beberapa OPD.

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini yaitu bagi setiap instansi/OPD pemerintah kabupaten Sumenep diharapkan agar lebih memaksimalkan kejelasan anggaran, misalnya dengan melakukan pelaporan realisasi anggaran yang dipublikasikan di website resmi masing-masing OPD sehingga informasi tersebut dapat

diketahui publik dan pihak yang berkepentingan lainnya.

## 6. REFERENCES

Afilu Hidayattullah, I. H. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(2), 92–100. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2.3573>

Ahdiyana, M. (2021). Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Badan Hukum Publik. *Manajemen Dewantara*, 5(1), 34–47. <https://doi.org/10.26460/md.v5i1.9491>

Anggitasari. (2019). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. 1–23.

Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 77–85. <https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p077>

Anjarwati, M. (2022). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan*

*Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi*. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 13(1), 15–27.

Bustami, L., & Senja, S. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Tanggapan Pelanggan Listrik Prabayar Pada PT. PLN (Persero) Rayon Palopo Kota. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 39–54. <https://doi.org/10.35906/je001.v4i2.94>

Cleary, M. (2019). Teori Pengawasan dan Teori Kinerja. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Dina Lathifa. (2022). *Asas Desentralisasi: Pengertian, Tujuan & Penerapannya dalam Fiskal*.

Hutama, R.S., & Yudianto, I. (2019). *The Influence of Budget Participation, Budget Goals Clarity and Internal Control Systems Implementation on Local Government Performance*. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(2), 58–76.

Junaidi. (2019). *Processing Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara.

Lahur, S. I. L., Simamora, L., & Diarsyad, M.

- I. (2022). Pengaruh Kejelasan Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD di Kabupaten Barito Utara). *JEMBA : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Bisnis, Akuntansi*, 2(2), 72–80  
<https://doi.org/10.52300/jemba.v2i2.7128>
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212.  
<https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463>
- Raharjo, S. (2021). *Cara Melakukan Uji Reliabilitas Alpha Cronbach's dengan SPSS*.
- Rio Pratama<sup>1</sup>, Henri Agustin<sup>2</sup>, S. T. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(2), 477–492.  
<https://doi.org/10.34152/fe.15.2.477-492>
- Satri, W. (2018). Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jambi. 13(1975), 31–36.
- Simbolon, D. (2022). *Analysis of The Effect of Clearance of Budget Targets, Competency of Government Apparatus on Performance Accountability with Internal Control System as Moderate Variables*. <https://doi.org/10.4108/eai.20-9-2022.2324783>
- Sugiyono. (2018). Pengaruh Kompetensi Beban Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Perawat Rumah Sakit Umum (RSU) Avisena Cimahi. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Sugiyono (2018, P. 13. (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.